



PERAN BAKORWIL III SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM KOORDINASI PENGELOLAAN SAMPAH

Indiati

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISOSPOL) "Waskita Dharma" Malang

Abstrak

BAKORWIL III adalah Badan Koordinasi Wilayah yang berada di wilayah III di Jawa timur dalam mengkoordinasi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan peran mengkoordinasi BAKORWIL III telah menjalankan perannya dengan baik. Permasalahan Peran BAKORWIL sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mengkoordinasi pengelolaan sampah, Faktor Pendukung dan penghambat dalam mengkoordinasi pengelolaan sampah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Soerjono Soekanto, pengertian Kordinasi, pengertian penelolaan sampah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BAKORWIL III dalam mengkoordinasi pengelolaan sampah telah menjalankan perannya dengan baik dengan mengadakan rapat koordinasi serta melaporkan kepada Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur secara empiris. BAKORWIL III sudah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

Kata Kunci: Peran, Koordinasi, BAKORWIL III, Pengelolaan Sampah.

PENDAHULUAN

Pada masa ini Indonesia masih dalam kondisi bencana nasional yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga dalam kurun waktu berjalan 1 (satu) tahun lebih berlalu, banyak sekolah, perguruan tinggi dan instansi yang harus mulai merubah sistem dan kagiatan yang sudah dilakukan secara terus menerus, yang adanya kemungkinan dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini akan berpengaruh karena adanya bencana tersebut, maka kegiatan pembelajaran baik pengajaran, penelitian maupun pengabdian hampir mulai kesulitan dengan berbagai kegiatannya yang seharusnya mudah menjadi sulit. Belum lagi hal ini harus dipaksakan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal yang mendukung untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan berjalan lebih baik.

Kedudukan bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) merupakan unsur yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya dipimpin oleh kepala bakorwil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Maka bakorwil merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur dalam mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkup wilayah kerja bakorwil, sebagai payung dalam menata dan mengatur wilayah kerja agar sesuai dalam kebutuhan sesuai perda yang berlaku di saat itu. Dalam kegiatannya bakorwil berperan dalam sinkronisasi, monitoring, evaluasi, penanganan aset dan inventarisasi permasalahan yang mana untuk mengumpulkan. Bakorwil mempunyai tugas membantu gubernur dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dalam mengatur kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan sampah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini. Yang mana Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Dalam menjaga kebersihan lingkungan serta hidup sehat Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Terkait dengan kebijakan pemerintahan tersebut dan ditindak lanjuti dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah dalam mengeloalah sampah dari produsen atau usaha yang menghasilkan kemasan sekali pakai dan menimbulkan sampah terus menerus maka pemerintah menentukan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana kegiatan mengurangi timbunan sampah, menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat di daur ulang, dapat digunakan lagi dan/atau mudah diurai melalui proses alam. Begitu juga konsumen atau asyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses

alam. Disini Bakorwil berperan dalam mengevaluasi serta mengkoordinasi kota/ kabupaten agar dapat melaksanakan sesuai aturan yang sudah ada di wilayah kerja masing-masing sebagai monitoring dan evaluasi yang dimiliki oleh Gubernur dalam menilai kota/ kabupaten yang dipimpin dengan diwakili oleh bakorwil di wilayah kerja masing-masing.

Dalam tinjauan administrasi negara terkait peran BAKORWIL III dilandasi dalam Pergub No 134 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2016 dan Pergub No 16 Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2016 peran BAKORWIL III yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum, rasa tanggung jawab merupakan aspek aktif dari suatu tempat atau jabatan. Menurut Kozier Barbara (1995), peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan orang lain untuk dilakukan seseorang tergantung pada posisinya dalam sistem. Peran mempengaruhi lingkungan dan ketertiban internal dan eksternal. Huruf adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari orang-orang dalam situasi sosial tertentu. Fungsi adalah definisi sosial tentang siapa kita dan siapa kita. peranan menjadi bermakna ketika berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi dari tempat dan pengaruh. Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah melakukan suatu pekerjaan. Kami selalu menulis kata peran, tetapi terkadang sulit bagi kami untuk mendefinisikan dan mendefinisikan peran. Peran umum juga melekat pada aktivitas. Peran dan posisi tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tanggung jawab jika tidak ada tempat atau tempat, dan

tidak ada tempat tanpa tanggung jawab. Setiap orang memiliki peran dalam kehidupan mereka di masyarakat. Peran mendefinisikan apa yang orang lakukan untuk masyarakat. Peran juga menentukan jumlah waktu yang diberikan masyarakat kepada mereka. Pengoperasian diatur oleh standar yang berlaku.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. (Rahman, 2020)

Tujuan Bakorwil "Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang". Sasaran Bakorwil "Meningkatnya hasil koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Malang". Sedangkan visi dan misi bakorwil tertera dalam visi dan misi Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024, bakorwil merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya. (Profil Badan Koordinasi Wilayah)

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2006: 212) adalah sebagai berikut: "Peran adalah aspek aktif dari suatu tempat. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia melakukan suatu fungsi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa peran adalah penilaian sejauh mana pekerjaan atau kontribusi seseorang terhadap

pencapaian tujuan yang ditetapkan, peran terbaik dapat diartikan sebagai peran yang diharapkan untuk dimainkan oleh orang yang bertanggung jawab.

Koordinasi adalah proses pengorganisasian elemen yang sangat kompleks sehingga semuanya datang bersama-sama dan bekerja sama secara efisien dan terkoordinasi. Dalam ilmu manajemen, istilah koordinasi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menggabungkan tujuan dan rencana aksi yang diletakkan pada semua elemen. Kita semua tahu bahwa organisasi memiliki departemen yang berbeda dan orang yang berbeda dengan pengalaman, ide, perspektif, dan pendekatan yang berbeda. Dalam ilmu manajemen, perbedaan tersebut harus disatukan dengan cara yang terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama organisasi.

George Robert Terry menjelaskan dalam bukunya *Principle of Management* yang dikutip oleh Handyaningrat (2002: 55), bahwa ada empat kriteria yang harus diikuti dalam proses perencanaan.

1. Anda harus memiliki rasa mampu bekerja sama.
2. Memiliki jiwa kompetitif di departemen sehingga setiap departemen melakukan yang terbaik.

Memiliki semangat tim yang diapresiasi oleh seluruh area organisasi. Keempat, Anda memiliki rasa loyalitas terhadap teman sehingga anggota tim dapat saling membantu.

Sampah dihasilkan oleh berbagai kegiatan di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, pertambangan, pariwisata atau kegiatan pasar. Sampah tidak sama dengan limbah. Limbah dapat berupa limbah padat, limbah padat dan limbah gas, sedangkan sampah hanya terdiri dari limbah padat. Sumber sampah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah domestik dan

sampah non rumah tangga. Sampah kecil lokal berasal dari rumah, rumah sakit, sekolah, pasar, sedangkan sampah non domestik berasal dari hutan, pertanian dan pertanian.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah tertinggal dalam kehidupan manusia sehari-hari atau oleh proses alam dalam bentuk padat atau semi padat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2008, sampah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sampah rumah tangga dari kegiatan sehari-hari keluarga, kecuali sampah dan sampah B3.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pribadi, prasarana sosial, bangunan umum dan/atau prasarana lainnya.
3. Limbah B3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah benih, limbah konstruksi, limbah yang secara teknis tidak dapat didaur ulang, limbah sesekali. (Dikutip dari Suryo Hartoko. 2018)

Pengelolaan sampah didasarkan pada prinsip tanggung jawab, ketekunan, keuntungan, kejujuran, hati nurani, kebersamaan, ketertiban, ketertiban, dan prinsip niaga. Asas akuntabilitas adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan Pasal 28H ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan prinsip ketekunan. pengelolaan sampah dilakukan melalui metode dan teknik

lingkungan yang sehat agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan membersihkan lingkungan, menjadikannya asri dan nyaman bagi masyarakat serta memanfaatkan sampah sebagai sumbernya.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya pengendalian masalah pencemaran, sedangkan pengendalian pencemaran adalah upaya pengendalian jumlah bahan pencemar yang masuk ke lingkungan atau dengan memberlakukan undang-undang pengendalian pencemaran. (Dikutip dari Mustofa. 2000).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui "Peran Bakorwil III Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Dalam Mengkoordinasi Penanggulangan Sampah".

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh data maka hubungan peneliti dengan narasumber/informan bersifat independen.

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu sendiri merupakan pendekatan dengan mengungkap, menggambarkan dan menganalisis berbagai peristiwa, fenomena, kejadian, sudut pandang, sikap dan sebagainya dengan

pengamatan yang tepat, seksama dan detail. (Yati, 2019)

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual secara jelas yang menggambarkan gejala atau peristiwa yang ada, mengidentifikasi masalah atau meninjau kembali keadaan dan praktek – praktek yang sedang terjadi, membuat evaluasi dan menentukan cara menghadapi masalah, membuat rencana dan menentukan keputusan kedepannya dengan melihat dan belajar dari pengalaman taua atau penelitian orang lain. (Machmud, 2016:136).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BAKORWIL III dalam Pengelolaan Sampah

Kebijakan publik merupakan respon terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah tertentu yang ditujukan untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan publik yang diberlakukan pemerintah bertujuan untuk menanggapi kebutuhan atau harapan dari situasi yang mempengaruhi banyak pihak. BAKORWIL III bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan dan pengembangan di lingkungan kerja di BAKORWIL III Malang dan tujuan BAKORWIL III adalah meningkatkan hasil koordinasi pembangunan, monitoring, evaluasi pengelolaan serta pengembangan di wilayah kerja BAKORWIL III Malang.

1. Cara Mengurangi Limbah Domestik / Sampah

Dalam mengurangi limbah domestik/Sampah, sudah menjadi hal yang direncanakan oleh pemerintah serta pecinta alam dalam mengurangi produksi sampah,

a. Tinggalkan Kantong Plastik

Selain limbah domestik cair ada juga limbah padat, sampah plastik juga menjadi limbah rumah tangga paling

besar yang diproduksi setiap harinya, hal tersebut tentu bisa menjadi ancaman lingkungan. Sebab, sampah plastik termasuk limbah rumah tangga anorganik yang sulit untuk diuraikan atau diolah kembali. Untuk mengurangnya, penulis menyarankan beralih dan menggunakan tas dari kain yang dapat di daur ulang dan mudah di lebur saat akan berbelanja, karena mengurangi konsumsi plastik lebih baik untuk lingkungan hidup. Gunakan juga kantong kertas untuk membungkus makanan.

b. Mengolah Sampah Organik

Selain sampah anorganik dalam kegiatan rumah tangga, berikutnya sampah organik juga banyak dihasilkan setiap harinya. Namun, limbah ini bisa diolah menjadi pupuk kompos agar lebih bermanfaat bagi tumbuhan. Penulis menyarankan dalam memanfaatkan limbah makanan sisa dengan mengolahnya kembali menjadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk tanaman hias ataupun kebun di halaman rumah. Dalam mempermudah daur ulang limbah rumah tangga, sebaiknya, melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik terlebih dahulu agar dapat mengatur dalam setiap proses daur ulangnya. Proses pemilahan dapat dilakukan saat Anda membuang sampah, dengan menyediakan 2 (dua) tempat sampah berbeda, masing-masing untuk limbah organik (seperti daun, kayu yang dapat terurai sendirinya ataupun menjadi pupuk kompos) dan limbah anorganik (seperti plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya).

c. Melakukan Daur Ulang Barang yang Tak Terpakai

Beberapa limbah domestik jika dipilah kembali sebelum dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), limbah domestik dapat dimanfaatkan kembali untuk dibuat menjadi barang baru. Misal, kaleng atau botol bekas bisa

dimanfaatkan untuk menanam bunga serta tanaman hias, kayu bekas bisa dibuat menjadi meja atau kursi, dan lain sebagainya.

d. Batasi Pemakaian Deterjen

Selanjutnya limbah domestik cair, hal ini juga menjadi penyebab utama yang mengancam rusaknya ekosistem sungai dan laut. Limbah rumah tangga ini sebagian besar disebabkan dari aktivitas mencuci dan mandi. Berbeda dari limbah cair lainnya yang bisa diolah dengan aman di dalam septic tank atau jamban, limbah deterjen mengandung Volatile Organic Compound (VOC) yang justru bisa merusak saluran pembuangannya karena zat tersebut. Pemakaian deterjen dan pelembut pakaian dapat dikurangi dengan beralih menerapkan cara yang lebih konvensional atau tradisional. Campuran cuka dan baking soda ternyata juga ampuh untuk membersihkan dan melembutkan pakaian. (Winastya, 2021)

2. Produksi Sampah

Berdasarkan Undang - Undang Pengelolaan Sampah No.18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik, dapat didefinisikan menjadi beberapa penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

- 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana.
 - 4) Puing bongkaran bangunan.
 - 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (Azwar, 1990:53)

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup sehat, karna keberadaan sampah merupakan tolak ukur seberapa bersih suatu lingkungan dan semakin bersih lingkungan maka semakin sehat lingkungannya. Dalam hidup bermasyarakat banyak karakteristik masyarakat yang peduli akan lingkungan dengan mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, atau mengolah kembali sampah yang dikeluarkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Namun masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan sampah dengan terus mengeluarkan sampah tanpa ada yang diperhitungkan.

1. Faktor Pendukung

Dalam mengelolah sampah tidak hanya persoalan -persoalan penghambat, namun juga ada faktor pendukung dalam mengelolah sampah di wilayah kerja Bakorwil III, berikut faktor – faktor pendukung pengelolaan sampah;

- a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- b. Bimbingan teknis persampahan yang pesertanya dari RT, Kelurahan, Kecamatan, PKK,

- kader kesehatan dan organisasi masyarakat.
- c. Sosialisasi kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di tempat-tempat publik dan melalui kegiatan kampanye seperti fotografi, melukis, mewarnai, dan lain – lain.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan
- e. Pelaksanaan patroli air secara berkala (1 bulan sekali);
- f. Pemantauan air limbah yang dibuang disungai dan sampah di bantaran;
- g. Evaluasi dan tindak lanjut temuan serta mengkoordinasikan dengan Kab/kota dan institusi terkait yang sesuai dengan kewenangan;
- h. Eksekusi bersama melalui sinergi kegiatan
- i. Identifikasi lokasi pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan timbunan sampah,
- j. Penyediaan sarana dan prasarana TPS.
- k. Pengelolaan sampah regional,
- l. Identifikasi lokasi dan kerjasama lintas sector saluran limbah tak berizin,
- m. Identifikasi lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata sungai;
- n. Berkoordinasi dengan BBWS dan Kab/Kota terkait;
- o. Edukasi masyarakat tentang budaya rumah menghadap sungai;
- p. Membuat Eco Riparian bantaran sungai;
- q. Penyediaan fasilitas pengurangan sampah dibentuknya rumah kompos;

- r. Penyediaan Bank sampah sebagai penguatan ekonomi dan penanggulangan sampah;
- s. Pemberian reward dan kebanggaan yang di berikan kepada daerah yang baik dalam penanganan sebagai percontohan daerah-daerah lain.

(Inventarisasi data Bakorwil III, 2021)

2. Faktor Penghambat

Dalam proses penanggulangan sampah di wilayah kerja Bakorwil III memiliki beberapa faktor penghambat dalam penanggulangannya, berikut faktor-faktor penghambat di setiap wilayah kerja Bakorwil III;

- a. Kekurangan jumlah TPS 3R, luasan lahan TPA dan sarana prasarana pendukung di butuhkan perluasan area TPA serta pembangunan 8 Unit TPS 3R di dukung peningkatan TPS 3R di 11 Unit, hal ini diharapkan dalam TPA (Khusus penanganan limbah B3 Domestik Regional lebih diprioritaskan serta bantuan sarana dan prasana yang memadai dalam pengolahan sampah.
- b. Alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan penurunan ketahanan pangan. Memberikan masukan teknis kegiatan pertambangan dan upaya reklamasi yang wajib dilakukan, perlu dilakukannya identifikasi terhadap pencemaran yang ditimbulkan akibat pertambangan. Sehingga perlu adanya pemantauan, pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi

- kegiatan pertambangan, yang mana dapat menjadi dasar dalam penetapan kebijakan dan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi izin wilayah usaha pertambangan.
- c. Adanya permasalahan sampah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana pada pengelolaan pelayanan bidang persampahan, volume sampah yang semakin bertambah tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pelayanan pengelolaan persampahan.
- e. Belum optimalnya grakan 3R pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat sumber sampah, perlu adanya sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah 3R.
- f. Penanganan persampahan belum semuanya wilayah terlayani pengelolaan sampahnya, karena armada terbatas sehingga cakupan wilayah yang luas tidak bisa terlayani (hanya ada 7 armada yang layak, kendaraan Amrol hanya 3), perlu adanya penambahan armada (kendaraan) dan SDM, armadanya, penambahan anggaran.
- g. Banyak TPS yang tidak permanen, sehingga container banyak yang rusak sehingga tidak layak digunakan, jadi perlunya di masing-masing wilayah untuk membuat TPS permanen.

- h. Pengurangan sampah, cakupan luas penyapuan tidak imbang dengan jumlah personil Pramuka Kebersihan Jalan, Karena banyak ruas jalan poros dan arteri yang belum tertangani karena kekurangan petugas Pramuka Kebersihan Jalan, perlu ditambahkan jumlah petugas Pramuka Kebersihan Jalan. (Paparan Bakorwil III, 2021).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas maka Peneliti simpulkan sbb:

1. Peran BAKORWIL III sebagai aparat pemerintah dalam pengelolaan sampah secara umum dilaksanakan dengan baik, untuk mengetahui peran BAKORWIL. III sebagai direktur koordinasi pengelolaan sampah pemerintah memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasi-kan tanggung jawab pemberdayaan, menjembatani dan melibatkan negara, terkait dengan peran organisasi dalam mengorganisir tim kerja, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pembantu gubernur, BAKORWIL III mengikuti program yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan sampah, ada 3 (tiga) komponen utama dalam pelaksanaan program yaitu Anggaran, Sumber daya manusia, Tim atau organisasi.

Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah kemudian diinformasikan kepada Gubernur Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Public. Dalam L. Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Public (hal. 7). Bandung: Penerbit Alfabeta.

Budiar, "Pemberdayaan Masyarakat Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Potensi Ekonomi Nyata," Repository Waskita Dharma, accessed July 11, 2021, <http://repository.waskitadharma.ac.id/items/show/121>.

Direktorat PPLP., (2012), Pedoman Umum Penyelenggaraan TPS 3R Berbasis Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum.

Direktorat PPLP., (2013), Paparan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 3R, Kementerian Pekerjaan Umum.

Emzi. (2010). metode penelitian kualitatif. Analisis data. Dalam Emzi, metode penelitian kualitatif. Analisis data (hal. 2 - 3). Jakarta: Rajawali pers. PT. grafindo persada.

Hartoko, Suryo, "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang

," Repository Waskita Dharma, accessed July 11, 2021, <http://repository.waskitadharma.ac.id/items/show/45>.

Hasan, I. (2019, Agustus 22). Pengelolaan Air Limbah Domestik Sebagai Upaya Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat (Study Di Rt 3 Rw 7 Kelurahan Tlogomas). Dipetik 7 April, 2021, dari UMM Institutional Repository: <https://eprints.umm.ac.id/50746/>

NAZILA, N. E. (2017, Agustus 29). Analisis Pengelolaan Sampah Medis Padat Puskesmas Di Kota Malang Sebagai Sumber Belajar Biologi. Dipetik Juli 4, 2021, dari UMM Institutional: <https://eprints.umm.ac.id/35052/>

Indiati

Peran Bakorwil Iii Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Dalam Koordinasi Pengelolaan(Hal 1864-1873)

Pemerintah Propinsi Jawa Timur
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2001

Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 134 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134
Tahun 2016

Profil Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa
Timur di Malang.
<https://bakorwilmalang.jatimprov.go.id/tentang-kami> (Diakses tanggal 22 Maret 2021 pukul 19.38 WIB)

Rakhmat, J. 2. (2012). Metode
Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh
Analisis Statistik. Dalam J. Rakhmat, Metode
Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh
Analisis Statistik (hal. 25). Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

Sejarah Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa
Timur di Malang.
<https://bakorwilmalang.jatimprov.go.id/tentang-kami-sejarah.html> (Diakses tanggal 22 Maret 2021 pukul 21.02 WIB)

Struktur Organisasi Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan
Provinsi Jawa Timur di Malang.
<https://bakorwilmalang.jatimprov.go.id/tentang-kami-struktur-organisasi.html> (Diakses tanggal 22 Maret 2021 pukul 20.23 WIB)

[jatimprov.go.id/tentang-kami-struktur-organisasi.html](https://bakorwilmalang.jatimprov.go.id/tentang-kami-struktur-organisasi.html) (Diakses tanggal 22 Maret 2021 pukul 20.23 WIB)

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Dalam Sugiyono,
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. (hal. 252 - 253 , 270-271,). Bandung:
Alfabeta

Sutrisno, "Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Program Bank Sampah Pada RW 13 RT
04 Jl. Hamid Rusdi Bunulrejo Blimbing Kota
Malang," Repository Waskita Dharma, accessed July
11, 2021,
<http://repository.waskitadharma.ac.id/items/show/134>.

Teti Suryati, 2014, Cara Bijak Mengolah
Sampah Menjadi Kompas Dan Pupuk Cair, PT
Agro Media Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

Winastya, K. P. (2021, Januari 30).
Limbah Domestik Adalah Sisa Buangan yang
Berasal dari Rumah Tangga, Ketahui Dampaknya.
Cara Mengurangi Limbah Domestik, hal.
<https://www.merdeka.com/trending/limbah-domestik-adalah-sisa-buangan-yang-berasal-dari-rumah-tangga-ketahui-dampaknya-kln.html>. Dipetik 7 Maret, 2021.